



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Analisis Rasio Keuangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

Tatik*¹, Muhammad Rizky Rizaldi²

¹Program D3 FBE Jl Kaliurang Km 14 Sleman-Yogyakarta, 085743413601, Universitas Islam Indonesia

²Program D3 FBE Jl Kaliurang Km 14 Sleman-Yogyakarta, 085743413601, Universitas Islam Indonesia
email : ¹162121302@uii.ac.id, ²16212035@students.uui.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang – Jawa Tengah jika dilihat dari rasio keuangan daerah yang meliputi: rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja modal, rasio belanja operasi dan varians belanja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, rasio varians belanja, rasio belanja operasi dan rasio efisiensi, kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang telah baik. Namun berdasarkan analisis rasio belanja modal, kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang masih buruk. Sektor belanja modal belum menjadi prioritas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang karena sektor belanja operasi masih mendominasi realisasi belanja pada dinas tersebut. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang terkait kinerja keuangannya, sehingga dinas tersebut dapat melakukan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja keuangan pada periode-periode anggaran selanjutnya.

Kata kunci : analisis rasio keuangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kinerja keuangan

Abstract

The purpose of this study was to analyze the financial performance of the Department of Agriculture and Food of Magelang Regency - Central Java when viewed from the regional financial ratios which include: effectiveness ratio, efficiency ratio, capital expenditure ratio, operating expenditure ratio and expenditure variance. This research uses descriptive qualitative method. The data used in the study is the 2018 Regional Budget Realization Report at the Agriculture and Food Service Office of Magelang Regency. Based on the results of research that has been carried out using analysis of effectiveness ratios, spending variance ratios, operating expenditure ratios and efficiency ratios, the financial performance of the Department of Agriculture and Food of Magelang Regency has been good. However, based on the analysis of the capital expenditure ratio, the financial performance of the Department of Agriculture and Food of Magelang Regency is still poor. The capital expenditure sector has not become a priority for the Department of Agriculture and Food of Magelang Regency because the operational expenditure sector still dominates the realization of expenditure at the agency. This research is expected to be an input for the Department of Agriculture and Food of Magelang Regency regarding its financial performance, so that the department can make the necessary improvements in order to improve financial performance in subsequent budget periods.

Keywords : financial ratio analysis, financial performance, regional revenue and expenditure budget



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

PENDAHULUAN

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang secara umum berupa dataran tinggi dengan dikelilingi gunung-gunung. Luas wilayah Kabupaten Magelang sekitar 108.573 Ha yang terdiri dari 86.410 Ha lahan pertanian atau 79,58% dari total lahan dan 22.163 Ha lahan bukan pertanian atau 20,41% dari total lahan. Kabupaten Magelang memiliki potensi pertanian yang sangat besar sesuai dengan lahan pertanian yang dominan dibandingkan lahan bukan pertanian.

Potensi pertanian yang sangat besar semestinya memberikan kontribusi pendapatan daerah yang besar juga. Kontribusi pendapatan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dinas terkait.

Jika masing-masing daerah mampu mengoptimalkan potensi daerahnya, diharapkan terwujud kemandirian daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mampu mengurangi pengangguran sehingga menurunkan angka kemiskinan (Diah Nurdiwati, Badrus Zaman, 2016).

Alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilaksanakan. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Analisa rasio keuangan daerah dapat digunakan pemerintah untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Anastasia, 2012).

Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya menilai kinerja keuangan pada sektor publik, khususnya APBD dan realisasinya, seperti yang dilakukan oleh Diah Nurdiwati & Badrus Zaman (2016), Juddy Julian Pilat & Jenny Morasa (2017), Wakhyudi, Heri Triyono (2013), Listiyani Natalia (2015), Anim Rahmayati (2016) serta Joko Pramono (2014). Penelitian terdahulu tersebut dapat memberikan gambaran kinerja sektor publik pada masing-masing obyek penelitian menggunakan beberapa analisis rasio keuangan sektor publik, yaitu berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan untuk menilai kinerja keuangan pada sektor publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang – Jawa Tengah menggunakan analisis rasio keuangan sektor publik, yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi belanja yang juga telah digunakan pada penelitian terdahulu oleh beberapa penulis lain. Selain rasio tersebut,



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

penelitian ini menggunakan analisis rasio belanja modal, analisis varians belanja dan analisis rasio belanja operasi yang belum terdapat pada penelitian terdahulu.

LANDASAN TEORITIS

1) Keuangan Daerah

Menurut UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umum pasal 156 ayat (1) disebutkan, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum, 2009:19-21).

3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahsun, Firma dan Heribertus (2011:81), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5) Analisis Laporan Keuangan

Salah satu teknik untuk melakukan Analisis Laporan Keuangan, yaitu dengan melakukan perhitungan Rasio Keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos dan membandingkan dengan rasio lain sehingga diperoleh informasi dan memberikan penilaian.

Adapun beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja sektor publik antara lain:

a. Rasio Efektivitas



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten

ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Rasio Efektivitas menggunakan rumus berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

b. Rasio Varians Belanja

Rasio Varians Belanja menggunakan rumus:

$$\text{Varians} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran}$$

c. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi (RBO) menggunakan rumus:

$$\text{RBO} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional} \times 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

d. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal (RBM) menggunakan rumus:

e. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja menggunakan rumus:

6) Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Nurdiwati dan Badruz Zaman berjudul Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Keuangan Daerah di Kota Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri jika dilihat dari rasio keuangan daerah yang meliputi: rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode lintas waktu (times series) dan metode lintas seksi (cross section) tentang analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan daerah dinyatakan cukup baik, rasio kemandirian terhadap kinerja keuangan dinyatakan baik, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan terhadap kinerja keuangan dinyatakan tidak baik serta rasio efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja keuangan dinyatakan baik.

Penelitian Wakhyudi (2013) berjudul Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan pemerintah Kabupaten Bogor didalam mengelola keuangan

daerahnya sendiri masih rendah. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada beberapa hambatan yaitu: Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD hingga Perda Laporan Realisasi APBD setiap tahunnya belum tepat waktu dan penganggarannya belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Penelitian Triyono berjudul Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian rendah dengan tingkat ketergantungan dari pihak eksternal masih tinggi. Rasio efektivitas yang dicapai tinggi. Rasio efisiensi menunjukkan dalam

$$\text{RBM} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal} \times 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

memungut PAD efisien. aktivitas belanja

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja} \times 100\%}{\text{Total Anggaran Belanja}}$$

pembangunan masih rendah. Rasio pertumbuhan menunjukkan hasil yang positif. Rasio derajat desentralisasi rendah.

Penelitian Anim Rahayati berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah sangat. Hal dibuktikan besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

Penelitian Listiyani berjudul Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten

ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.

Penelitian Joko Pramono berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian. Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83 % (2010) dan 24,44% (2011).

METODE PENELITIAN

1) Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007:68).

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, dimana merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam dan tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi (Sujarweni, 2014:22). Studi kasus adalah salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis. Dalam analisis studi kasus (seperti halnya analisis kualitatif pada umumnya), peneliti diberi kebebasan membangun struktur tulisan berdasarkan domain yang dikaji serta keinginan-keinginan

peneliti tentang domain mana yang dikembangkan (Bungin, 2007:237-238).

2) Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat historis, yakni data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang – Jawa Tengah tahun 2018. Selanjutnya untuk mencari sumber teori dan pelaksanaannya diperoleh dari riset pustaka dan penelitian sejenis yang dipublikasikan lewat jurnal penelitian.

3) Teknik pengumpulan data

Menurut Sugiyono (2014:62), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak mungkin akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi (documentation). Penelusuran data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian sebagai pendukung data penelitian yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa; gambaran umum Kabupaten Magelang dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang – Jawa Tengah tahun 2018 serta data lain yang diperlukan terkait dengan metode analisis yang digunakan

4) Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang – Jawa Tengah tahun 2018. Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini antara lain:

- Menghitung rasio keuangan berdasarkan data yang diperoleh.
- Menyusun tabel sesuai hasil perhitungan rasio keuangan.
- Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio keuangan atau dengan melihat tabelnya.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan pada penelitian ini dibatasi hanya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2018 yang disajikan pada gambar berikut ini:

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017					
Uraian		ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
4	PENDAPATAN - LRA	25.000.000,00	38.425.000,00	153,70	198.600.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	25.000.000,00	38.425.000,00	153,70	198.600.000,00
4.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	15.000.000,00	28.425.000,00	189,50	181.675.000,00
4.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sama - LRA	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	16.375.000,00
5	BELANJA	38.231.380.100,00	34.404.885.072,00	89,99	33.007.086.610,00
5.1	BELANJA OPERASI	33.144.955.100,00	29.813.704.872,00	89,95	32.074.356.210,00
5.1.1	Belanja Pegawai	13.944.148.000,00	15.953.838.430,00	95,02	13.503.233.819,00
5.1.1.2	Belanja Barang Bayar Jasa	10.225.917.000,00	9.335.138.142,00	91,29	6.156.578.691,00
5.1.1.5	Belanja Hibah	7.094.890.000,00	5.422.708.300,00	76,43	12.366.912.780,00
5.1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	47.613.000,00
5.2	BELANJA MODAL	5.086.425.000,00	4.591.180.200,00	90,26	932.730.400,00
5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Pemeliharaan	1.463.675.000,00	1.016.178.000,00	69,47	751.052.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.426.750.000,00	3.376.202.000,00	98,54	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	190.000.000,00	188.800.000,00	99,37	178.680.000,00
5.2.5	Belanja Modal Alat Transportasi	2.000.000,00	6.998.200,00	99,97	2.999.400,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(38.206.380.100,00)	(34.366.460.072,00)	89,95	(32.809.036.610,00)
SISA LEREH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)		(38.206.380.100,00)	(34.366.460.072,00)	89,95	(32.809.036.610,00)

Gambar 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perhitungan rasio keuangan meliputi rasio efektivitas, rasio varians belanja, rasio belanja operasi, rasio belanja modal dan rasio efisiensi berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Rasio Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target Penerimaan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{38.425.000}{25.000.000} \times 100\%$$

$$= 153,70\%$$

b. Rasio Varians Belanja

$$\text{Rasio Varians} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran}$$

$$= 34.404.885.072 - 38.231.380.100$$

$$= -3.826.495.028$$

c. Rasio Belanja Operasi (RBO)

$$\text{RBO} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{29.813.704.872}{34.404.885.072} \times 100\%$$

$$= 86,6\%$$

d. Rasio Belanja Modal (RBM)

$$\text{RBM} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.591.180.200}{34.404.885.072} \times 100\%$$

$$= 13,3\%$$

e. Rasio Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Keseluruhan Realisasi Belanja}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{34.404.885.072}{38.231.380.100} \times 100\%$$

$$= 86,45\%$$

2. Temuan Penelitian

Berikut ini disajikan tabel hasil perhitungan analisis rasio keuangan:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan

No	Rasio Keuangan	Hasil Perhitungan
1	Rasio Efektivitas	153,70%
2	Rasio Varians Belanja	-3.826.495.028
3	Rasio Belanja Operasi	86,6%
4	Rasio Belanja Modal	13,3%
5	Rasio Efisiensi	86,45%

Sumber: Data Diolah

3. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas membandingkan antara realisasi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan target penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Penerimaan PAD



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten

ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Kriteria Efektivitas	Prosentase Keserasian
Sangat Efektif	>100 %
Efektif	90 – 100 %
Cukup Efektif	80 – 90 %
Kurang Efektif	60 – 80 %
Tidak Efektif	≤60 %

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas sebesar 153,70%, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang masuk dalam kriteria **Sangat Efektif**. Hal tersebut diartikan bahwa realisasi penerimaan PAD lebih tinggi dari anggaran/target penerimaan PAD.

b. Rasio Varians Belanja

Rasio Varians Belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dan anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Varians Belanja, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang masuk dalam kriteria kinerja keuangan yang baik karena realisasi belanja lebih kecil Rp 3.826.495.028 dari anggaran belanja. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010), yakni “apabila realisasi belanja suatu instansi tidak melebihi dari yang ditargetkan maka instansi tersebut dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik”.

c. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara realisasi belanja operasi dengan total belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.

Adapun kriteria keserasian rasio belanja operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Rasio Keserasian Rasio Belanja Operasi

Kriteria Keserasian	Prosentase Keserasian
Sangat Serasi	>100 %
Serasi	90 – 100 %
Cukup Serasi	80 – 90 %
Kurang Serasi	60 – 80 %
Tidak Serasi	≤60 %

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas sebesar 86,6%, Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Magelang masuk dalam kriteria **Cukup Serasi**.

d. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara realisasi belanja modal dengan total belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.

Adapun kriteria keserasian rasio belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Kriteria Keserasian Rasio Belanja Modal

Kriteria Keserasian	Prosentase Keserasian
Sangat Serasi	>100 %
Serasi	90 – 100 %
Cukup Serasi	80 – 90 %
Kurang Serasi	60 – 80 %
Tidak Serasi	≤60 %

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Belanja Modal sebesar 13,3%, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang masuk dalam kriteria **Tidak Serasi**. Hal tersebut mengindikasikan bahwa prosentase belanja modal sangat kecil dibandingkan dengan total belanja. Rasio belanja modal ini berbanding terbalik dengan rasio belanja operasi.

e. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara total realisasi belanja dengan total anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.

Adapun kriteria keserasian rasio belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Kriteria Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi	Prosentase Efisiensi
Tidak Efisien	>100
Kurang Efisien	>90 – 100
Cukup Efisien	>80 – 90
Efisien	>60 – 80
Sangat Efisien	≤60

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efisiensi sebesar 86,45%, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang masuk dalam kriteria **Cukup Efisien**. Hal tersebut dapat diartikan bahwa



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten

ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

realisasi belanja sebesar 86,45% dari total anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sudah baik sesuai analisis rasio efektivitas, rasio varians belanja dan rasio belanja operasi dan rasio efisiensi.

Namun berdasarkan analisis rasio belanja modal, kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang masih buruk. Sektor belanja modal belum menjadi prioritas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang karena sektor belanja operasi masih mendominasi realisasi belanja pada dinas tersebut.

Saran

Adapun saran peneliti untuk Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada tahun-tahun anggaran berikutnya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang lebih memprioritaskan anggaran pada sektor belanja modal yang difungsikan sebagai investasi jangka panjang dengan cara meningkatkan anggaran belanja modal itu sendiri. Hal tersebut bertujuan agar Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga peringkat dan status kemandirian daerah dapat ditingkatkan.
2. Penulis menyarankan agar Dinas Pertanian dan Pangan konsisten merealisasikan anggaran secara efisien maupun efektif, dengan tetap memperhatikan proporsi serapan anggaran agar program peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat terlaksana dengan baik.

Keterbatasan Penelitian

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2018. Sehingga penelitian ini

tidak bisa melihat perkembangan kinerja keuangan beberapa tahun.

2. Metode analisis yang digunakan dalam penilaian kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang terbatas pada rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja modal, rasio belanja operasi dan varians belanja.

Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan data keuangan beberapa tahun terakhir, sehingga dapat memberikan gambaran perkembangan kinerja keuangan beberapa tahun pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.

Metode analisis pada penelitian selanjutnya juga dapat diperluas, tidak hanya menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja modal, rasio belanja operasi dan varians belanja saja.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang terkait kinerja keuangannya, sehingga dinas tersebut dapat melakukan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja keuangan pada periode-periode anggaran selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Andi Melisa. 2012. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, Makassar*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten

ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

- Mahsun, Moh., Firma, Sulistyowati dan Heribertus, Andre Purwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Natalia, Listiyani. (2015). *Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman*.
- Nurdiwaty, Diah & Zaman, Badruz. 2016. *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Kediri*. Jurnal Ekonomika-Bisnis, Vol 7 No. 1, Januari 2016. Diakses pada <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jeb>.
- Pilat, Juddy Julian dan Morasa, Jenny. 2017. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015*. Jurnal Accountability, Vol.6 No.01, 2017.
- Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta*. Among Makarti, Vol.7 No.13, Juli 2014.
- Rahmatina, Aulia Zhufinsa Nur. 2011. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009*. Skripsi. Institut Manajemen Telkom Bandung.
- Rahmayati, Anim. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No. 1 Maret 2016.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Triyono, Heri.(2013). *Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo*.
- Ulum, Ihyahul. 2009. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125). Jakarta.
- Wakhyudi. 2013. *Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol. 1 No. 2, 2013.